

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : **KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Program : **Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Jumlah penduduk Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan data statistik Tahun 2019 adalah 13.941 jiwa (laki-laki 6.924 jiwa dan perempuan 7.017 jiwa).	Akses Kurangnya transportasi umum yang ada di setiap nagari serta sarana dan prasarana pelayanan yang belum responsif gender.	1. Masih kurangnya pemahaman petugas pelayanan. 2. Minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah nagari 2. Kesibukan masyarakat yang bekerja pada jam pelayanan Kantor Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan representatif serta responsive gender.	1. Penyusunan SOP dan Maklumat Pelayanan. 2. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang responsif gender. 3. Menghimpun data administrasi perizinan dan administrasi lainnya	Masyarakat yang melakukan pelayanan ke kecamatan	Output : Jumlah masyarakat yang terlayani Income : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)	Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, pembiayaan, dan penyelenggaraan.	Partisipasi Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelengkapan administrasi perizinan dan administrasi lainnya.	1. Masih kurangnya pemahaman petugas pelayanan. 2. Minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN). 3. Belum lengkapnya data administrasi perizinan dan administrasi lainnya.	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah nagari 2. Kesibukan masyarakat yang bekerja pada jam pelayanan Kantor Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan representatif serta responsive gender.	1. Penyusunan SOP dan Maklumat Pelayanan. 2. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang responsif gender. 3. Menghimpun data administrasi perizinan dan administrasi lainnya	Masyarakat yang melakukan pelayanan ke kecamatan	Output : Jumlah masyarakat yang terlayani Income : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Tujuan : Terlaksananya Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN)	Pelimpahan kewenangan pada Aspek Perizinan adalah : a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Fungsi Hunian (baru dan renovasi), kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan perumahan oleh pengembang; b. Surat Izin Temporal Usaha skala kecil; c. Izin Penelitian/Survey di Wilayah Kecamatan.	Kontrol Masih belum maksimalnya informasi dan sosialisasi tentang SOP pengurusan administrasi perizinan dan administrasi lainnya.	1. Masih kurangnya pemahaman petugas pelayanan. 2. Minimnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (PATEN). 3. Belum lengkapnya data administrasi perizinan dan administrasi lainnya.	1. Kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah nagari 2. Kesibukan masyarakat yang bekerja pada jam pelayanan Kantor Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pelayanan yang memadai dan representatif serta responsive gender.	1. Penyusunan SOP dan Maklumat Pelayanan. 2. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan yang responsif gender. 3. Menghimpun data administrasi perizinan dan administrasi lainnya	Masyarakat yang melakukan pelayanan ke kecamatan	Output : Jumlah masyarakat yang terlayani Income : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
	Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi meliputi : a. merekomendasikan pemberian izin dan non izin; b. merekomendasikan pengangkatan dan	Manfaat Belum maksimalnya sanksi bagi masyarakat yang belum/tidak tertib administrasi perizinan dan administrasi						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3		Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
		ISU GENDER		Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		Faktor Kesenjangan	lainnya, sehingga masyarakat yang sudah terbit administrasi kurang merasakan manfaatnya.						
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	atau pemberhentian Wali Nagari; c. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Penjabat Wali Nagari; d. merekomendasikan penilaian SKP kepala UPTD/UPTB di wilayah kecamatan; e. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Sekolah dan Kepala UPTD/UPTB; f. merekomendasikan pengangkatan dan atau pemberhentian anggota Barnus Nagari dan perangkat pemerintahan nagari; g. merekomendasikan surat keterangan pindah, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga; h. merekomendasikan Surat keterangan berkelakuan baik.							
	Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan Basa Ampik Balai Tapan masih minim dan masih belum representatif.								

Tapan, 27 Maret 2020
 PEMERINTAH KABUPATEN TAPAN
 KECAMATAN BASA AMPIK
 BASA AMPIK BALAI TAPAN
 AELIZEN, S.Sos
 PES/IR 19720605199303 1 005